



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;

- d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Data Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 30 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU dan HUKUM,

KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	PENGARAH			
1.	Francis Edward Makabory	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; - Menerima Laporan dari Tim Pelaksana dan Agen Perubahan; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Abdul Muin Salewe	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Endang Wulansari	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Abdon Retraubun	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Adi Murat	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
2.	TIM PELAKSANA			
1.	Michael Mote	Sekretaris	Ketua	- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan Reformasi Birokrasi; - Mengkoordinasikan pelaksanaan dan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				kegiatan Reformasi Perubahan; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Reformasi Perubahan; - Membimbing, mengawal dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi.
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Henry Jackson	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, serta
2.	Rosana Ballu	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Andre William Muabuay	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Irma Lestari Ayomi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Boston Winata Sipayung	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6.	Veri Pigome	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	melakukan panel bersama Inspektorat.
7.	Nazareth M. Mauri	Operator Layanan Operasional	Anggota	
8.	Aristotelis M. Idorwai	Operator Layanan Operasional	Anggota	
b. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Robison Onicius Jeujanen	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; - Melaksanakan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk kerjanya,
2.	Bryan Roberttho Okta Hindom	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
3.	Yohanis Heatubun	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
4.	Romanus Higimur	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Maryam Wulandari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6.	Junike Wattimena	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
7.	Hiskia Riki Sinon	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, serta melakukan panel bersama Inspektorat.
8.	Muzdalifah Waleulu	Tenaga Administrasi	Anggota	
c.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1.	Dominggus Kambu	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, serta melakukan panel bersama Inspektorat.
2.	Elisa Kambuaya	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Yulistin Devitasari Benyamin	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Bryan Ade Bandaso	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Alimudin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6.	H. M. Salmondo JB. Rahakbau	Operator Layanan Operasional	Anggota	
7.	Febrianti Tonglo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
8.	Steven Brando Kambuaya	Operator Layanan Operasional	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
d.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Marqaline E. Kaiway	Kasubbag Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>; - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, serta melakukan panel bersama Inspektorat.
2.	Handy Stenly Salamahu	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3.	Rangga	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Heflina Mawar Maramis	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5.	Jois Nelson Jitmau	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6.	Marthen Untung Tupa	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota	
7.	Septinus Ayomi	Operator Layanan Operasional	Anggota	
8.	Lusika Sara Sefiana Naa	Tenaga Administrasi	Anggota	
e.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Tri Hartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan <i>assesment</i> individu
2.	Kemal Yahya	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Dewi Sartika Tenriajeng	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, serta melakukan panel bersama Inspektorat.
4.	Syahril Tesar Heremba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Muhammad Dzaky Putra Sani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6.	Hayyus	Ahli Pertama- Pranata Komputer	Anggota	
7.	Selviana Idorway	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
8.	Hofni Bukorpioper	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
f.	TIM PENGAWASAN			
1.	Herlina M. Isir	Kasubbag Keuangan	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
2.	Kristofel Maikel Ajo	Penelaan Teknis Kebijakan	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	Siti Aisyah Nugroho	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>; - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, serta melakukan panel bersama Inspektorat.
4.	Gifari Rizki Pratama	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
5.	Novi Kezia Kawiyah	Ahli Pertama- Pranata Komputer	Anggota	
6.	Gunawan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
7.	Maulana Lukman Imaduddin Lestaluhu	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
8.	Yohana Yanelin Marisan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
g.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Adolof Apner Mandacan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat; - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan
2.	Putri Rayustica	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Arif Giantoko	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Dessy Ary Sandy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Irene Sintyah Ayamiseba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
6.	Dwi Herdiany	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota	penilaian komponen hasil untuk kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, serta melakukan panel bersama Inspektorat.
7.	Jhoni J. Komendi	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
8.	Koreri Yonas Wabdaron	Operator Layanan Operasional	Anggota	
h.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Hajra Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, melakukan penilaian komponen hasil untuk kerjanya, merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, serta melakukan panel bersama Inspektorat.
2.	Kurniawan Eko Sambodo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
3.	Muhammad Sulton Muttaqin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Yulius D. Mangata	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5.	Ie Itshak Rosalio Mansumber	Ahli Pertama- Penata Kelola Pemilu	Anggota	
6.	Carolina Mareike Pertiwi Wabia	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
7.	Halimudin Refideso	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
8.	Paskalina Paulina M. Sauyai	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Michael Mote	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Henry Jackson	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi.
3.	Hajra Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Dominggus Kambu	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



KETUA,

ttd.

FRANCIS EDWARD MAKABORY